



Simon Petrus, S.Sos, M.Si.
FOTO Bagus Kasmita/Borneo Tribune

Hasil Pemeriksaan Keuangan 2012

Pemkab Sekadau Raih WTP

Borneo Tribune, Sekadau Pemerintah Kabupaten Sekadau dengan berbagai upaya dan kerja keras semakin menunjukkan penguasaan keuangan Pemerintah Daerah membaik. Atas kerja keras Pemkab Sekadau tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) Perwakilan Kalbar memberi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pengelolaan keuangan tahun 2012.

Hasil pemeriksaan keuangan itu diterima langsung oleh Bupati Sekadau Simon Petrus, dan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sekadau Aron, dari Kepala BPK Perwakilan Kalbar Adi Sudibyo di Kantor BPK RI Perwakilan Kalbar di Jalan Ayani Pontianak, Jumat, (13/9).

Bupati Sekadau Simon Petrus, mengabarkan pihaknya merasa bangga atas keberhasilan dalam meraih predikat WTP tersebut karena belum pernah mendapatkannya. Berat pengawasan secara berkesinambungan, termasuk dengan dukungan DPRD Kabupaten Sekadau, pihaknya mampu meraih predikat WTP.

"Pertama tama saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara teknis dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk sekretariat DPRD Kabupaten Sekadau atas opini WTP yang diberikan oleh BPK kepada Kabupaten Sekadau. Untuk itu juga saya mewakili Pemerintah daerah dan sekretariat DPRD mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Kalbar yang telah membrikan prestasi yang terbaik WTP kepada Kabupaten Sekadau, kami akan berusaha mempertahankan prestasi yang kami peroleh ini, harapan saya melalui prestasi ini dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja Pegawai Kabupaten Sekadau," jelas Bupati di narai wawancara Sabtu (14/9).

Dalam setiap pertemuan dengan SKPD, orang nomor satu di bumi lawang kuari ini selalu mengingatkan untuk memanfaatkan anggaran dengan benar agar tepat sasaran dan tidak sampai menimbulkan masalah dengan unsur penegak hukum.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Sekadau Aloysius, dikonfirmasi via telepon mengatakan, keterlibatan pihaknya dalam pengawasan penggunaan keuangan negara tersebut karena bagian dari penyelenggaraan Pemerintah di Daerah sesuai amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Meski demikian, pihaknya lebih mengutamakan komunikasi agar penggunaan keuangan Negara yang dilaksanakan aparat Pemerintah lebih tepat sasaran dan sesuai dengan harapan masyarakat.

"Dan kita juga berharap prestasi WTP yang diperoleh Pemkab Kabupaten sekadau agar bisa dipertahankan, sehingga tahun 2013 nanti Pemkab Sekadau mendapat rapot penilaian WTP kembali, ini yang kita harapkan. Saya juga ingatkan kepada semua jajaran Pemkab Sekadau agar bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, bekerja dengan jujur dan mengedepankan akuntabilitas dan profesionalisme," ujar Aloy.

Untuk diketahui Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion artinya Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang mate-

rial, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penjelasan laporan keuangan juga telah disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan.

Sedangkan istilah Wajar dimaksudkan bahwa Laporan Keuangan bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya.

Sebelumnya, Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar Adi Sudibyo menjelaskan bahwa pemeriksaan ini dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Laporan Hasil Pemeriksaan ini merupakan rapor dari pengelolaan keuangan daerah. Meski begitu, predikat tersebut lanjut dia bukan sebuah 'hadiah', melainkan hasil dari kerja keras Pemkab dan DPRD Sekadau dalam mengelola dan mengawasi penggunaan keuangan Negara.

BPK Kalbar mengharapkan Pemkab Sekadau mampu mempertahankan predikat yang sangat baik dalam pengelolaan keuangan Negara tersebut pada tahun-tahun berikutnya.

"Biasanya mempertahankan predikat ini sulit. Maka kami berpesan peranan inspektorat harus diperkuat. Kunci untuk mendapatkan predikat WTP adalah komitmen kepala daerah dan DPRD," tambah Adi Sudibyo. (Mto).